



Dewan Soroti Melesetnya Target PAD



SIDANG: Bupati Sambas Satono saat menyampaikan jawaban atas PU Fraksi DPRD Kabupaten Sambas dalam paripurna, Selasa (13/6).

SAMBAS – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Sambas menyoroti tak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah di beberapa sektor dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Bupati Sambas, Satono mengatakan tak tercapainya target pendapatan daerah, khususnya BPHTB dari hak pengguna usaha, dimana kewenangan sebagai dasar pembayaran pajak daerah berada di instansi pemerintah pusat.

Selanjutnya terkait penurunan pendapatan lain yang sah, disebabkan karena adanya hibah yang tak terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

“Ini akan menjadi bahan evaluasi kedepannya,

dalam rangka peningkatan pendapatan daerah,” kata Bupati Sambas, saat Rapat paripurna DPRD Sambas yang beragendakan mendengar jawaban Bupati Sambas atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022, Selasa (13/6).

Termasuk kedepannya, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber potensi yang ada.

“Kami akan berupaya terus meningkatkan pendapatan asli daerah yakni penggalian sumber potensi yang ada, terkait yang tak tercapai secara

maksimal, nanti akan dibahas secara maksimal dengan instansi terkait,” katanya.

Sebelumnya, dalam pandangan umum, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Sambas mempertanyakan khususnya 2 sektor pendapatan. Hal itu disampaikan juru bicaranya, H Asmuli H Sundang.

“Fraksi kami mempertanyakan khususnya 2 sektor pendapatan, yakni pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Karena 2 sektor ini sangat rendah realisasinya dibanding proyeksi

target yang telah direncanakan,” kata Asmuli.

Target pendapatan asli daerah sebesar Rp209,29 Mil-

liar dengan realisasi Rp167,63 miliar atau 80,10 persen. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah dianggarkan sebesar Rp40,83 miliar terealisasi Rp31,13 miliar atau 76,25 persen. “Apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi dibanding proyeksi target dari 2 sektor pendapatan ini?” sebut Asmuli.

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sambas melalui juru bicaranya, Prantika SIP. Fraksi Partai Golkar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sesuatu yang normatif dan berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa se-

cara garis besar proses pelaksanaan APBD yang berjalan pada kurun tahun anggaran 2022 sesuatu yang normatif dan berjalan sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Prantika.

Kedepannya, Pemkab juga dituntut memberikan hasil padakemajuan dan keberhasilan program-program inovasi yang memberikan pengaruh terhadap semaksimal terpenuhinya harapan masyarakat dalam merasakan nilai tambah dari pembangunan.

“Laporan pengelolaan anggaran ini menjadi tolak ukur perkembangan pembangunan serta keberhasilan kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (fah)